JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN METHODIST *eISSN: 2599 - 1175*
VOLUME 10 N0. 2, 2026, 353-365 *ISSN: 2599 - 0136*

PERAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENDORONG PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN PADA EMITEN PERKEBUNAN DAN PANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA

[1]Mohamad Rifki Syach, [2]Munawaroh, [3]Mohamad Djadjuli
[1,2,3]Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Cirebon, Indonesia
Email: [1]rifkimohamad602@gmail.com

ABSTRACT

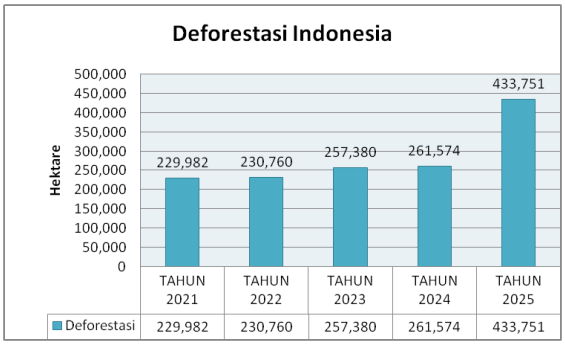
This study aims to examine the role of independent boards of commissioners, audit committees, and institutional ownership in fostering environmental transparency among plantation and food crop sub-industry firms listed on the Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2025. The data were derived from annual reports and sustainability reports of 12 companies selected through purposive sampling. Panel data regression analysis using EViews 12 was employed to process the secondary data. The partial test results revealed that only the independent board of commissioners had a positive and significant effect on environmental disclosure, while the audit committee and institutional ownership did not exhibit a significant influence. Nevertheless, collectively, these three variables were found to affect environmental disclosure.
Keywords: Independent Board of Commissioner, Audit Committee, Institutional Ownership, Environmental Disclosure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional dalam mendorong transparansi lingkungan pada perusahaan subsektor perkebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2025. Sumber data yang digunakan adalah laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dari 12 perusahaan yang dipilih melalui metode purposive sampling. Analisis regresi data panel dengan bantuan EViews 12 diterapkan untuk mengolah data sekunder tersebut. Hasil pengujian secara parsial mengindikasikan bahwa hanya dewan komisaris independen yang memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan, sedangkan komite audit dan kepemilikan institusional tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Namun secara simultan, ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.
Kata Kunci: ***Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Pengungkapan Lingkungan.***

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam melimpah, mencakup hutan tropis, keanekaragaman hayati, serta berbagai komoditas perkebunan dan tanaman pangan. Kekayaan tersebut menjadi salah satu penunjang bagi perkembangan sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, dan perkebunan. Kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian nasional tergolong sangat besar, sehingga menjadikannya sebagai salah satu sektor yang strategis. Pada tahun 2023, Indonesia menghasilkan 47,08 juta ton CPO dengan volume ekspor mencapai 27,54 juta ton (Bahtera et al., 2025). Namun, aktivitas sektor ini juga memicu berbagai permasalahan lingkungan, seperti deforestasi, konflik agraria, pelanggaran hak masyarakat adat, dan pencemaran lingkungan yang berdampak pada keanekaragaman hayati, perubahan iklim, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat (Nugroho & Dewi, 2025)



Sumber: Institute World Resources, 2025

Gambar 1. Deforestasi Indonesia Periode 2021 – 2025

Menurut laporan State of Climate dari (Institute World Resources, 2025), Indonesia menempati peringkat kedua negara dengan deforestasi terbesar di dunia selama periode 2014–2024, dengan luas sekitar 10 juta hektare atau 11% dari total deforestasi global. Sementara itu, data Auriga Nusantara menunjukkan bahwa deforestasi di Indonesia meningkat dari 229.982 hektare pada tahun 2021 menjadi 433.751 hektare pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan akibat ekspansi perkebunan, pertambangan, dan alih fungsi lahan masih menjadi tantangan serius. Kondisi itu mendorong perusahaan meningkatkan kejelasan dalam melaporkan dampak lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan dan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Deforestasi di Indonesia masih menjadi isu lingkungan yang serius akibat ekspansi perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Apabila tidak dikendalikan, laju deforestasi diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya kebutuhan lahan dan aktivitas ekonomi, sehingga mengancam keberlanjutan ekosistem (Virgy et al., 2020). Kondisi ini memperkuat urgensi penerapan praktik keberlanjutan, terutama pada subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang kerap dikaitkan dengan deforestasi, konflik agraria, pelanggaran hak masyarakat adat, dan pencemaran lingkungan. Di sisi lain, meningkatnya permintaan akan transparansi dari para investor, pihak pengawas, dan masyarakat mendorong perusahaan untuk memperbaiki laporan lingkungan serta menerapkan prinsip keberlanjutan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya membangun kepercayaan dari berbagai pihak yang berkepentingan. (Bahtera et al., 2025).

Oleh karena itu, dibutuhkan cara yang dapat mendorong perusahaan agar lebih jujur dan bertanggung jawab dalam memberikan informasi mengenai dampak lingkungan mereka.. Menurut (Nasional & Governansi, 2021), GCG terbagi ke dalam dua kategori, yaitu struktural dan prinsip (governance principles). Kajian ini difokuskan pada kategori struktural yang meliputi tiga elemen: komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Elemen tersebut dipilih karena keterlibatan langsungnya dalam pengawasan serta objektivitas pengukurannya melalui laporan tahunan. Dalam perspektif stakeholder, ketiga mekanisme struktural ini berperan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas yang diwujudkan melalui kualitas pengungkapan lingkungan (Fujianti et al., 2024) dan (Sugiyarti & Rahmadhianti, 2024). Karena itu, ketiganya dipilih sebagai proksi tata kelola perusahaan.

Dewan komisaris independen dipilih sebagai variabel independen karena berperan dalam mengawasi manajemen secara objektif serta mengurangi asimetri informasi, sehingga berpotensi meningkatkan kualitas pengungkapan lingkungan (Rahmadani et al., 2021). Temuan dari sejumlah studi terdahulu mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen berkontribusi positif terhadap kualitas laporan lingkungan perusahaan. (Fujianti et al., 2024).

Komite audit dipilih karena tugasnya adalah mengawasi kualitas laporan perusahaan, termasuk laporan keberlanjutan,

sehingga bisa mendorong peningkatan transparansi dalam pengungkapan lingkungan (Trimuryanti & Lindrawati, 2025). Temuan dari berbagai studi terdahulu juga mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit memberikan dampak yang positif terhadap laporan lingkungan perusahaan (Rahmadani et al., 2021).

Kepemilikan institusional dipilih karena memiliki kemampuan untuk mengawasi kebijakan manajemen dan mendorong akuntabilitas perusahaan, termasuk dalam pengungkapan lingkungan (Azizah & Machdar, 2025). Sejalan dengan itu, hasil penelitian terdahulu pengungkapan lingkungan terbukti mendapat pengaruh positif dari keberadaan variabel tersebut. (Sayuti et al., 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

Theory Stakeholder

Freeman (1984) melalui teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang terpengaruh atau memengaruhi kegiatan operasionalnya (Pratama & Serly, 2024). Oleh karena itu, perusahaan harus membuat nilai dengan cara berkinerja baik secara berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan informasi para pihak yang mempunyai kaitan (Suryarahman & Trihatmoko, 2021).

Berdasarkan teori stakeholder, mekanisme Good Corporate Governance berperan dalam mendorong perusahaan memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan. Keberadaan dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional berperan dalam memperkuat fungsi pengawasan atas keputusan yang dikeluarkan oleh manajemen, sehingga turut meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan lingkungan (Purwitasari & Sriyono, 2025). Dengan demikian, teori stakeholder menjadi landasan konseptual untuk memahami kontribusi ketiga mekanisme tata kelola berkontribusi terhadap peningkatan pengungkapan lingkungan guna merespons kepentingan berbagai pihak terkait.

Pengungkapan Lingkungan

Pengungkapan lingkungan merupakan bagian dari kerangka laporan keberlanjtan yang mencerminkan tanggung jawab perusahaan dalam menginformasikan tentang hasil dan tindakan dalam mengelola lingkungan (Famuji, 2023). Informasi tersebut dapat dipublikasikan melalui berbagai media, seperti laporan tahunan, laporan keberlanjutan, atau kanal resmi perusahaan, yang memuat kebijakan, kegiatan, serta kinerja lingkungan korporasi (Sayuti et al., 2021).

Berdasarkan pendekatan teori stakeholder, pengungkapan lingkungan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan, yang mencakup aspek keuangan sekaligus aspek pertanggungjawaban lingkungan (Gustari & Sisdianto, 2024). Transparansi informasi lingkungan mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik keberlanjutan dan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan (Elza, 2025).

Pengukuran pengungkapan lingkungan dilakukan dengan metode penilaian (scoring) Mengacu pada standar GRI 2021 seri 300 (lingkungan) yang memiliki 8 aspek dan 32 indikator, pengungkapan lingkungan dihitung dengan rumus PL = (Total item yang diungkapkan / Total Item GRI) × 100%.

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak internal perusahaan, sehingga

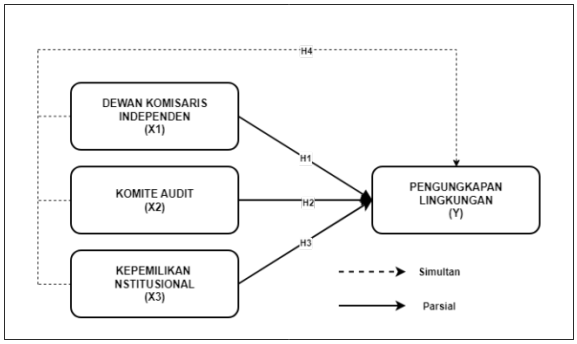
mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara objektif dan imparsial. Keberadaannya mendorong peningkatan transparansi dengan memberikan informasi, baik yang wajib disampaikan maupun yang disampaikan secara sukarela, termasuk informasi lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (Purwitasari & Sriyono, 2025). Metode pengukuran yang diterapkan adalah skala nominal dengan cara menjumlahkan seluruh anggota dewan komisaris independen yang duduk dalam struktur dewan, yang selanjutnya dinyatakan dalam rumus Ln(DKI).

Komite Audit

Komite audit adalah organ yang dibentuk langsung oleh dewan komisaris untuk membatu dalam hal pengawasan independen, terutama terkait pelaporan keuangan, manajemen risiko, kegiatan audit, dan implementasi tata kelola perusahaan (Arsjah, 2025). Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit berperan memastikan efektivitas pengendalian serta mendorong transparansi pengungkapan informasi, termasuk pengungkapan lingkungan. Oleh karena itu, komite audit yang berfugsi secara efektif, akan dapat meningkatkan kualitas lingkungan perusahaan (Richard & Wijaya, 2022). Rumus: KA = (Jumlah Komite Audit / Dewan Komisaris) x 100%.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham oleh entitas berbentuk lembaga, seperti pemerintah, lembaga keuangan, badan usaha berbadan huku,, serta organisasi lainnya (Sugiyarti & Rahmadhianti, 2024). Kepemilikan institusional yang besar dapat memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, mengurangi tindakan tidak bertanggung jawab, serta mendorong transparansi, termasuk pengungkapan mengenai lingkungan (Zullaekha & Susanto, 2021). Rumus: KI = (Saham Institusional / Jumalah Saham Beredar) x 100%.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

Hipotesis Penelitian

Penelitian (Zulfanmusafa & Wedhatami, 2025) menurut teori stakeholder, perusahaan dituntut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan melalui pengungkapan yang transpatran dan mudah dipahami. Dalam sudut pandang ini, peran dewan komisaris independen adalah untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap manajemen sehingga kualitas pengungkapan lingkungan meningkat. Proporsi dewan komisaris independen yang lebih besar akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi lingkungan yang lebih kuas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan entitas (Wijayanti et al., 2024). Pengungkapan lingkungan memperoleh dampak positif dari keberadaan komisaris independen, berdasarkan temuan yang ada (Fujianti et al., 2024). Berdasarkan teori pemangku kepentingan dan temuan sebelumnya, hipotesis dirumuskan seperti berikut:

H_1: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

Penelitian (Sinaga & Hendrani, 2024)teori stakeholder menjelaskan bahwa komite audit berperan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan melalui pengawasan terhadap kualitas pelaporan, termasuk pengungkapan lingkungan. Komite audit yang efektif diharapkan mampu mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi lingkungan, baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan maupun sebagai implementasi dari prinsip-prinsip good corporate governance (Arsjah, 2025). Temuan studi empiris menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan (Rahmadani et al., 2021). Berdasarkan konsep pemangku kepentingan dan temuan riset sebelumnya, telah disusun hipotesis sebagai berikut:

H_2: Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

Penelitian (Yani & Suputra, 2020) teori stakeholder menjelaskan bahwa memiliki institusi memperkuat peran pengawasan terhadap manajemen sehingga mendorong peningkatan pengungkapan keberlanjutan, termasuk dalam hal pengungkapan mengenai lingkungan. Semakin tinggi proporsi saham institusional, semakin besar tekanan bagi perusahaan untuk menyajikan informasi lingkungan sebgai bagian dari akuntabilitas kepada pemangku kepentingan (Fahira & Yuliandhari, 2025). Temuan yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan oleh institusi memiliki dampak positif pada transparansi informasi mengenai lingkungan (Sayuti et al., 2020). Mengacu pada teori pemangku kepentingan dan temuan empiris, hipotesis ini dirumuskan:

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan

Mengacu pada teori stakeholder serta temuan dari (Nurhakiki et al., 2024) dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional merupakan elemen-elemen tata kelola perusahaan yang memperkuat pengawasan terhadap manajemen. Pengawasan ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengungkapan lingkungan guna memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan entitas. Berlandaskan teori tersebut dan bukti empiris dari penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4: Dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data sekunder yang digunnakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, dengan menggunakan pendekatan analisis secara kuantitatif. Ruang lingkup penelitian mencakup perusahaan-perusahaan pada subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang menjadi peserta pencatatan di Bursa Efek Indonesia selama ;lima tahun berturut-turut, yakni 2021 hingga 2025. Pengambilan data dilakukan dengan mengunjungi laman resmi BEI (www.idx.co.id) serta situs resmi masing-masing perusahaan.

Populasi dan Sampel

Penelitisn ini melibatkan populasi sebanyak 29 perusahaaan subindustri

perkeebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di BEI. Teknik purposive sampling kemudian digunakan untuk memilih sampel, yang menghasilkan 14 perusaahaan sebagai objek yang diteliti. Dari 14 perusahaan tersebut, diperoleh 70 observasi awal, namun setelah dilakukan perlakuan outlier, tersisa 60 observasi yang siap dianalisis.

Tabel 1. Seleksi Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah	Total
1	Perusahaan Subindustri Perkebunan dan Tanaman Pangan yang terdaftar di BEI 2021-2025	29	29
2	Perusahaan yang tidak bergerak dibidang kelapa sawit yang terdaftar di BEI 2021-2025	(5)	24
3	Perusahaan kelapa sawit yang tidak melaporkan AR & SR secara berturut-turut selama periode 2021-2025	(6)	18
4	Perusahaan yang tidak mengungkapkan laporan tanggung jawab lingkungan dengan Indeks GRI Standar 2021	(4)	14
Jumlah		70	
Data Outier		10	
Data Yang Digunakan		60	

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang diterapkan dalam riset ini mencakup statistik deskrptif dan regresi data panel sebagai alat analisis data. Regresi data panel dimanfaatkan untuk menguji hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Prosedur analisis diawali dengan menentukan model estimasi yang paling tepat melalui uji model data panel, apabila model telah ditetapkan, maka dilaksanakan uji asumsi klasik. Persamaan regresi pada penelitian ini disajikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X1it + \beta X2it + \beta X3it + \varepsilon$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik deskriptif

	ED	DKI	KA	KI
Mean	0.673438	0.475839	0.677779	0.707727
Maximum	0.937500	1.098612	1.000000	0.959170
Minimum	0.250000	0.000000	0.333300	0.058660
Std. Dev.	0.156876	0.459191	0.203239	0.186930
Observasi	60	60	60	60

Sumber: Eviews 12, (2026)

Berdasarkan tabel diatas, setelah dilakukan outlier terhadap 10 data ekstrem, diperoleh 60 data observasi. Rata-rata dari semua variabel lebih tinggi dibandingkan dengan deviasi standar, yang memperlihatkan bahwa data tersebar secara merata dan memenuhi kriteria distribusi normal.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji Chow

Tabel 3. Uji Chow

Uji Chow	Nilai Prob.	Keterangan
Cross-section Chi-square	0.0066	FEM

Sumber: Eviews 12, (2026)

Berdasarkan output uji Chow pada Tabel 3, diketahui bahwa probabilitas Cross-section Chi-square mencapai 0,0066, di mana nilai ini berada di bawah $\alpha = 0{,}05$. Hal ini mengarah pada penolakan H_0, sehingga Fixed Effect Model (FEM) ditetapkan sebagai model regresi yang paling sesuai. Konsekuensinya, langkah berikutnya adalah melakukan Uji Hausman untuk memastikan pemilihan model.

Uji Hausman

Tabel 4. Uji Hausman

Uji Hausman	Nilai Prob.	Keterangan
Cross-section Random	0.3884	REM

Sumber: Eviews 12, (2026)

Berdasarkan output uji Hausman pada Tabel 4, diketahui bahwa probabilitas Cross-section random mencapai 0,3884, di mana nilai ini berada di atas α = 0,05. Hal ini mengarah pada penerimaan H_0, sehingga Random Effect Model (REM) ditetapkan sebagai model regresi yang paling sesuai. Untuk memperkuat keputusan tersebut, langkah berikutnya adalah melakukan uji Lagrange Multiplier guna menentukan REM atau CEM.

Uji Lagrange Multiplier

Tabel 5. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier	Cross-section	Keterangan
Breusch-Pagan	(0.1478)	CEM

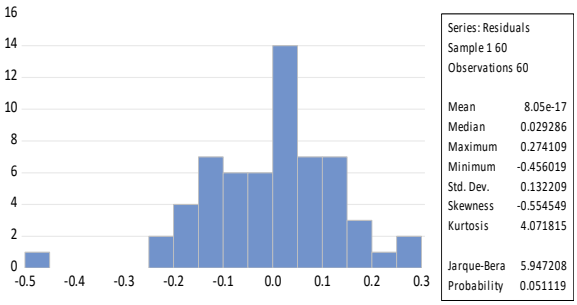
Sumber: Eviews 12, (2026)

Berdasarkan output uji Breusch-Pagan, diketahui bahwa probabilitas mencapai 0,1478, di mana nilai ini berada di atas α = 0,05. Hal ini mengarah pada penerimaan H_0, sehingga Common Effect Model (CEM) ditetapkan sebagai model regresi data panel yang paling sesuai digunakan.

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Tabel 6. Uji Normalitas



Sumber: Eviews 12, (2026)

Berdasarkan analisis normalitas yang dilakukan dengan uji Normalitas, diperoleh angka probabilitas 0,0511191 ≥ 0,05. Oleh karena itu, data dalam studi ini memiliki distribusi normal sehingga memenuhi kriteria normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Uji Multikolinearitas

	DKI	KA	KI	Keterangan
DKI	1.000000	-0.222303	-0.050645	Bebas dari multikolinearitas
KA	-0.222303	1.000000	-0.387679	Bebas dari multikolinearitas
KI	-0.050645	-0.387679	1.000000	Bebas dari multikolinearitas

Sumber: Eviews 12, (2026)

Berdasarkan pengujian yang dilaksanakan, diketahui bahwa koefisien korelasi antar variabel bebas yang meliputi dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional semuanya menunjukkan angka di bawah 0,85. Temuan ini menegaskan bahwa tidak terdapat hubungan yang substansial antar variabel bebas, sehingga model penelitian terbukti bebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Prob.	Keterangan
DKI	0.2941	Bebas dari heteroskedastisitas
KA	0.2752	Bebas dari heteroskedastisitas
KI	0.1573	Bebas dari heteroskedastisitas

Sumber: Eviews 12 (2026)

Tabel 8 memperlihatkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai probabilitas du atas 0,05. Temuan ini mengonfirmasi bahwa H_0 diterima, yang berarti model regresi tebebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis - Uji Determinasi R^2

Tabel 9. Uji R^2

Weighted Statistics			
Adjusted R-squared	**0.251709**	S.D. dependent var	0.156876
Prob(F-statistic)	0.000234		

Sumber: Eviews 12 (2026)

Tabel 9 memperlihatkan nilai adjusted R-squared sebesar 0,251709, atau 25,17%, yang mengindikasikan besarnya kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Ini berarti bahwa 25,17% dari variabel Pengungkapan Lingkungan dapat dipahami melalui DKI, KA, dan KI, sementara sebesar 74,83% dijelaskan oleh variabel lain yang berada di luar variabel tersebut.

Uji Analisis regresi Data Panel

Tabel 10. Uji Regresi Data Panel

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	0.731530	5.872324	0.0000
Ln DKI	0.143898	3.603993	0.0007
KA	-0.194710	-1.992154	0.0512
KI	0.007638	0.073629	0.9416

Sumber: Eviews 12 (2026)

Tabel 10 menunjukkan persamaan regresi dengan model Random Effect Model (REM) sebagai berikut: PL = 0.731530 + 0.143898DKI - 0.194710 KA + 0.007638 KI + ε

Dari persamaan CEM yang dihasilkan, nilai konstanta sebesar 0,731530 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen yaitu dewan komisaris independen (X1), komite audit (X2), dan kepemilikan institusional (X3) bernilai nol, maka pengungkapan lingkungan (Y) diprediksi berada pada angka 73,15%. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa pengaruh masing-masing variabel independen terhadap pengungkapan lingkungan (Y) bervariasi. Variabel dewan komisaris independen (X1) memiliki koefisien regresi 0,143898, yang berarti bahwa setiap kenaikan X1 sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan Y sebesar 14,38%, dengan asumsi variabel lain tetap. Sebaliknya, penurunan X1 sebesar 1% akan menurunkan Y sebesar 14,38%. Variabel komite audit (X2) menunjukkan koefisien -0,194710, yang mengindikasikan hubungan terbalik dengan Y; peningkatan X2 sebesar 1% akan menurunkan Y sebesar 19,47%, sedangkan penurunan X2 sebesar 1% akan meningkatkan Y sebesar 19,47%. Sementara itu, variabel kepemilikan institusional (X3) memiliki koefisien 0,007638, yang berarti bahwa kenaikan X3 sebesar 1% akan menaikkan Y sebesar 0,76%, dan penurunan X3 sebesar 1% akan menurunkan Y sebesar 0,76%.

Uji Parsial (Uji-t)

Tabel 11 menunjukkan nilai signifikansi X1 = 0,0007 (≤ 0,05) dan koefisien 0,143898, sehingga H1 diterima. Dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan lingkungan, sejalan dengan (Wijayanti et al., 2024). Komisaris independen memperkuat pengawasan dan mendorong transparansi lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab kepada stakeholder (Purwitasari & Sriyono, 2025). Temuan ini sejalan dengan teori stakeholder yang menggarisbawahi adanya kewajiban perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan, di mana pengungkapan lingkungan menjadi instrumen pemenuhan kebutuhan informasi pemangku kepentingan (Suryarahman & Trihatmoko, 2021). Pengaruh positif tersebut relevan dengan karakteristik subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang berkaitan erat dengan sumber daya alam dan penggunaan lahan. Aktivitas seperti pengelolaan lahan, konsumsi air, pemupukan, dan pengolahan limbah berpotensi menimbulkan konsekuensi lingkungan yang mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, semakin baik kinerja dewan komisaris yang independen dalam melakukan pengawasan tanpa adanya keterikatan dengan pihak internal perusahaan, semakin tinggi motivasi perusahaan untuk secara terbuka mengungkapkan tindakan pengelolaan dan

pengurangan dampak lingkungan sebagai wujud pemenuhan kepentingan para pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Fujianti et al., 2024; Nurhakiki et al., 2024; Rahmadani et al., 2021) yang menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Temuan ini menegaskan bahwa penambahan dewan komisaris independen mampu memperkuat fungsi pengawasan, mendorong transparansi lingkungan, serta menakomodasi harapan pemangku kepentingan.

Hasil uji t menunjukkan bahwa varibel komite audit memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,0512, yang melebihi tingkat signifikansi 5% (0,05). Oleh karena itu, H_2 ditolak. Temuan ini berarti bahwa keberadaan komite audit, yang selama ini berperan dalam mengawasi pelaporan, pengendalian internal, dan kepatuhan bisnis, ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pengungkapan lingkungan (Nugroho & Dewi, 2025), keberadaannya secara kuantitatif belum mampu meningkatkan pengungkapan lingkungan pada perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan. Keadaan ini mungkin timbul karena komite audit lebih memusatkan perhatian pada laporan keuangan, kontrol internal, manajemen risiko, serta kepatuhan, sedangkan isu lingkungan dan ESG belum mendapatkan perhatian yang signifikan (Fujianti et al., 2024; Richard & Wijaya, 2022). Dalam perspektif stakeholder, komite audit juga belum menjadi mekanisme yang secara langsung mendorong pemenuhan kebutuhan informasi lingkungan. Efektivitas komite audit tidak hanya bergantung pada kuantitas anggota, tetapi juga pada kualitas individu yang meliputi kompetensi, independensi, pengalaman, serta ketelitian dalam pelaksanaan pengawasan. Hasil penelitian ini sejalan dengan(Arsjah, 2025; Fujianti et al., 2024; Richard & Wijaya, 2022) yang menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan, yang berarti bahwa kuantitas anggota komite audit saja tidak cukup untuk mendorong transparansi lingkungan, sehingga keberhasilan pengawasan lebih dipengaruhi oleh mutu dan kemampuan anggota beserta kegiatan pengawasan yang dilaksanakan.

Sementara itu, hasil dari uji t nilai signifikansi untuk variabel kepemilikan institusional tercatat sebesar 0,9416 yang berada di atas batas toleransi 0,05. Sehingga hipotesis H_3 tidak diterima. Ini berarti bahwa kepemilikan institusional tidak memengaruhi pengungkapan mengenai lingkungan. Meskipun investor institusional memiliki kemampuan dan sumber daya untuk mengawasi manajemen (Zullaekha & Susanto, 2021), proporsi kepemilikan yang besar pada perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan belum terbukti mampu meningkatkan pengungkapan lingkungan. Para investor institusional kemungkinan besar belum menjadikan informasi lingkungan sebagai prioritas utama, baik dalam fungsi pengawasan maupun dalam proses pengambilan keputusan investasi (Wiransyah et al., 2024). Akibatnya, tekanan terhadap manajemen untuk meningkatkan transparansi lingkungan relatif terbatas. Dengan demikian, besarnya kepemilikan institusional tidak secara otomatis menunjukkan efektivitas pengawasan terhadap aspek lingkungan, karena efektivitasnya juga dipengaruhi oleh karakteristik, orientasi investasi, dan keterlibatan investor dalam pengawasan kebijakan keberlanjutan. Hasil penelitian ini mendukung temuan dari (Anggraini et al., 2025; Fathurohman et al., 2022; Wiransyah et al., 2024) yang melaporkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Temuan

ini mengindikasikan bahwa proporsi kepemilikan institusional semata tidak memadai untuk meningkatkan transparansi lingkungan di tingkat korporasi.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 11. Uji F

Weighted Statistics			
Adjusted R-squared	0.251709	S.D. dependent var	0.156876
Prob(F-statistic)	**0.000234**		

Sumber: Eviews 12 (2026)

Berdasarkan tabel 11, nilai p-value (F-statistik0 tercatat sebsar 0,000234, yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini mengarah pada penerimaan H4, yang berarti secara simultan variabel dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketiha mekanisme tata kelola tersebut bersama-sama berkontribusi dalam menjalankan variasi pengungkapan lingkungan. Bagi perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang berkaitan erat dengan sumber daya alam dan penggunaan lahan, penerapan tata kelola yang efektif dapat mendukung transparansi informasi mengenai kebijakan, aktivitas, dan dampak lingkungan perusahaan (Gustari & Sisdianto, 2024). Meskipun komite audit dan kepemilikan institusional tidak memiliki dampak ketika dilihat secara terpisah, ketiga elemen tersebut dapat memberikan pengaruh ketika berfungsi secara sinergis. Keberhasilan tata kelola perusahaan tidak hanya bergantung pada satu instrumen tunggal, akan tetapi ada aspek lain yang tidak kalah penting yaitu sinergi antara fungsi pengawasan dewan komisaris indepeden, komite audit, dan kepemilikan institusional. Dari sudut pandang teori stakeholder, efektivitas mekanisme tata kelola tersebut akan memungkinkan perusahaan untuk merespons kebutuhan pemangku kepentingan terhadap informasi sosial dan lingkungan (Fujianti et al., 2024). Dengan demikian, peran tata kelola menyeluruh meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengungkapan lingkungan (Wahyuningrum et al., 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan membutuhka sinergi mekanisme tata kelola, terutama pada perusahaan perkebunan dan tanaman pangan yang berdampak pada lahan, SDA, limbah, dan emisi. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya dituntut untuk memiliki mekanisme tata kelola secara formal, tetapi juga menjain efektivitas pengawasan untuk meningkatkan transparansi lingkungan sebagi bentuk akuntabilitas kepada stakeholder.

KESIMPULAN

Dari ketiga mekanisme tata kelola yang diteliti, hanya dewan komisaris independen yang terbukti memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah dewan komisaris independen akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap manjemen, yang pada akhirnnya mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi lingkungan. Sementara itu, keberadaan komite audit dan tingkat kepemilikan institusi tidak memiliki dampak pada pengungkapan terkait lingkungan, yang menunjukkan bahwa banyaknya anggota komite audit ataupun proporsi kepemilikan institusional belum mampu secara langsung meningkatkan pengungkapan mengenai isu-isu lingkungan. Namun, uji siimultan menunjukkan DKI, Ka, dan KI secara bersama-sama memengaruhi pengungkapan lingkungan. Implementasi GCG terpadu mendukung transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada stakeholder. Degan demikian, hasil pengujian hipotesis mengungkapkan bahwa pengaruh mekanisme

tata kolal terhadap pengungkapan lingkungan bervariasi antar variabel.

Saran praktis: Rekomendasi praktis yang dapat diberikan adalah agar perusahaan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi lingkungan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, yang sebaiknya disusun mengikuti Standar GRI 2021 dan mengoptimalkan peran pengawasan dari dewan komisaris independen serta komite audit. Bagi para investor, informasi terkait lingkungan dan standar tata kelola yang baik dapat menjadi dasar dalam mengevaluasi risiko, komitmen, dan keberlanjutan perusahaan. Dari perspektif teoritis, penelitian mendatang disarankan untuk memperluas subjek dan rentang waktu penelitian serta menambahkan variabel seperti kepemilikan manajerial, keberagaman dalam dewan, dan kinerja lingkungan (PROPER). Penelitian yang akan datang juga dapat mengadopsi teori legitimasi dan teori sinyal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengungkapan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, M., Darsono, & Oetavio, D. Q. (2025). How Investment Activity and Corporate Governance Affect the Disclosure of Esg. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *22*(1). https://doi.org/10.7454/jaki.v22i1.2049

Arsjah, R. J. (2025). Pengaruh Komite Audit , Kinerja Lingkungan , Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon: Studi Pada Perusahaan Pertambangan Bei 2019 – 2023 Dengan Pendekatan Data Panel. *Jurnal Lentera Bisnis*, *14*. https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i2.1595

Azizah, A. R., & Machdar, N. M. (2025). Nilai Perusahaan pada Sektor Energi: Literature Review ESG Disclosure, Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan dengan Moderasi Kepemilikan Institusional. *Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(2), 2256–2270.

Bahtera, N. I., Hutagaol, M. P., & Harianto. (2025). Analisis Kritis Kebijakan Hilirisasi Kelapa Sawit Indonesia. *Diponegoro Journal Of Economics*, *14*(3), 161–174.

Elza, P. (2025). *Analisis Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Pengungkapan Keuangan Berkelanjutan*. *1*(1).

Fahira, Z., & Yuliandhari, W. S. (2025). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan Terhadap Carbon Emission Disclosure Perusahaan Energi Di Bei (2021-2023). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, *14*(03), 1203–1213.

Famuji, R. T. (2023). *Pengaruh Pengungkapan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan*.

Fathurohman, M., Purwohedi, U., & Armeliza, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Publik Dan Institusional Terhadap Pengungkapan Lingkungan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, *3*(1), 245–264.

Fujianti, L., Nelyumna, N., Azizah, W., Astuti, S. B., Hilmiyah, N., & Qodriyah, A. L. (2024). Good Corporate Governance Dan Environmentalal, Social, Governance Disclosures Di Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, *14*(1), 19–36. https://doi.org/10.22219/jrak.v14i1.28986

Gustari, P., & Sisdianto, E. (2024). Kontribusi Green Acounting Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dan Kinerja Lingkungan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *2*(12).

Institute World Resources. (2025). *State of Climate Action 2025*.

Nasional, K., & Governansi, K. (2021). *Pedoman ini diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi*.

Nugroho, Ri., & Dewi, R. R. (2025). Pengaruh greeninnovation, environmental disclosure dan komite

audit terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, *9*(1), 2578–2595.

Nurhakiki, H., Sari2, R. N., & Supriono. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Dewan Komisaris Independen, Foreign Ownership, Dan Green Accounting Terhadap Pengungkapan Sustainability Reporting. *Jurnal Akuntansi*, *14*(2), 1–11. https://doi.org/10.37859/jae.v14i2.7908

Pratama, A. P., & Serly, V. (2024). Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *6*(3), 1285–1301. https://doi.org/10.24036/jea.v6i3.1699

Purwitasari, O., & Sriyono. (2025). Leverage, Profitabilitas, Likuiditas, Dewan Komisaris, dan Komite Audit terhadap Pengungkapan Sustainable Development Goals. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *7*(2), 253–268. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i2.7051

Rahmadani, K., Darli, E., & Kurnia, P. (2021). Pengungkapan lingkungan perusahaan: ditinjau dari manajemen laba dan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, *3*(1), 438–457.

Richard, L., & Wijaya, H. (2022). *Pengaruh media exposure, dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan asing terhadap environmental disclosure*. *11*(1), 58–71. https://doi.org/10.33508/jima.v11i1.3978

Sayuti, A., Sukma, P., & Aprianto, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Lingkungan. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, *2*(2), 109–120. https://doi.org/10.30812/rekan.v2i2.1467

Sinaga, R. O., & Hendrani, A. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Aktivitas, Komite Audit, dan Likuiditas Terhadap Sustainability Report. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, *7*(3), 5196–5216. https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.9237

Sugiyarti, L., & Rahmadhianti, T. (2024). Environmental Disclosure: Environmental Performance, Institutional Ownership And Audit Committee Part Of Good Corporate Governance. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*, *2*(3), 908–917.

Suryarahman, E., & Trihatmoko, H. (2021). Effect of Environmental Performance and Board of Commisioner On Environmental Disclosure. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, *10*, 1–10.

Trimuryanti, M. C., & Lindrawati, L. (2025). Pengaruh profitabilitas, komite audit dan diversifikasi gender terhadap pengungkapan informasi lingkungan. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, *21*(1), 44–57.

Virgy, M. A., Djuyandi, Y., & Darmawan, W. B. (2020). *Journal of Political Issues Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International*. *1*, 74–91.

Wahyuningrum, I. F. S., Putri, N., & Hidayah, R. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Lingkungan di Perusahaan yang terdaftar di Singapore Exchange. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, *18*(2), 417–423. https://doi.org/10.14710/jil.18.2.417-423

Wijayanti, A. H., Agustina, L., & Anita, N. (2024). Pengaruh Media Coverage, Audit Firm Type, Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Environmental Disclosure Dengan Kinerja Lingkungan Sebagai Variabel Moderating. *Bookchapter Sustainable Accounting*, 126–152.

Wiransyah, A., Husni, T., & Alfarisi, M. F. (2024). Pengaruh komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan kepemilikan

institusional terhadap pengungkapan emisi karbon dimoderasi kinerja lingkungan pada perusahaan sektor energi di BEI tahun 2019-2023. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, *7*(5), 4735–4752.

Yani, N. P. T. P., & Suputra, I. D. G. D. (2020). *Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility*. 1196–1207.

Zulfanmusafa, M., & Wedhatami, B. (2025). *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Dalam Penguatan Mekanisme Pengawasan Korporasi Terhadap Pelaksanaan Tanggung*.

Zullaekha, R. N., & Susanto, B. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Profitabilitas, dan Kinerja Lingkungan terhadap Environmental Disclosure (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *Borobudur Accounting Review*, *1*(1), 102–114. https://doi.org/10.31603/bacr.4894